

Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Pengembangan Keilmuan Islam Kontemporer

Dahlina¹, Said Maskur², Muhammad Faisal³

Universitas Darul 'Ulum Lamongan, STAI Sultan Abdurrahman Kepri, Indonesia

Email Korespondensi: mohamad.akrii@gmail.com, said.maskur@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 15 Juli 2026

ABSTRACT

The integration-interconnection paradigm developed by M. Amin Abdullah has become one of the most influential approaches in reconciling religious knowledge and modern science in Indonesian Islamic higher education. This article analyzes the implementation of the integration-interconnection paradigm in the development of contemporary Islamic knowledge by identifying five key implementation dimensions, namely epistemological, methodological, curricular-pedagogical, institutional-structural, and cultural-contextual. Through a qualitative-descriptive approach with systematic literature analysis, this research develops a comprehensive framework that includes measurable indicators for each dimension, a four-phase transformation maturity model consisting of deconstruction, reorientation, integration-interconnection, and institutionalization, as well as case studies of three Islamic educational institutions in Indonesia. Findings indicate that the implementation of the integration-interconnection paradigm faces significant challenges in the epistemological and institutional dimensions, while the curricular-pedagogical dimension shows relatively more consistent progress. Critical analysis identifies four main risks including epistemological risk of superficial integration, institutional risk of structural resistance, pedagogical risk of implementation gap, and contextual risk of local identity loss. This article contributes an implementation model that can serve as a guide for Islamic educational institutions in operationalizing the integration-interconnection paradigm sustainably and contextually.

Keywords: Integration-Interconnection Paradigm, Contemporary Islamic Knowledge, M. Amin Abdullah, Institutional Transformation, Interdisciplinary

ABSTRAK

Paradigma integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah telah menjadi salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam upaya mendamaikan ilmu agama dan sains modern di perguruan tinggi Islam Indonesia. Artikel ini menganalisis implementasi paradigma integrasi-interkoneksi dalam pengembangan keilmuan Islam kontemporer dengan mengidentifikasi lima dimensi kunci implementasi, yakni epistemologis, metodologis, kurikular-pedagogis, institusional-struktural, dan kultural-kontekstual. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur sistematis, penelitian ini mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang mencakup indikator terukur untuk setiap dimensi, model kematangan transformasi empat fase yang terdiri dari dekonstruksi, reorientasi, integrasi-interkoneksi, dan institusionalisasi, serta studi kasus tiga institusi pendidikan Islam di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa implementasi paradigma integrasi-interkoneksi menghadapi tantangan signifikan pada dimensi epistemologis dan

institusional, sementara dimensi kurikular-pedagogis menunjukkan kemajuan relatif lebih konsisten. Analisis kritis mengidentifikasi empat risiko utama yang meliputi risiko epistemologis berupa integrasi superficial, risiko institusional berupa resistensi struktural, risiko pedagogis berupa kesenjangan implementasi, dan risiko kontekstual berupa kehilangan identitas lokal. Artikel ini menyumbangkan model implementasi yang dapat dijadikan panduan bagi institusi pendidikan Islam dalam mengoperasionalkan paradigma integrasi-interkoneksi secara berkelanjutan dan kontekstual.

Kata Kunci: Paradigma Integrasi-Interkoneksi, Keilmuan Islam Kontemporer, M. Amin Abdullah, Transformasi Institusional, Interdisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan keilmuan Islam kontemporer berada pada persimpangan yang kritis antara tradisi intelektual klasik yang kaya dan tuntutan modernitas yang menekankan pendekatan ilmiah-empiris. Dalam konteks ini, dikotomi antara ilmu agama (dirasah islamiyyah) dan ilmu umum (al-'ulum al-'ammah) telah menjadi problem epistemologis yang berlangsung sepanjang sejarah pendidikan Islam modern di Indonesia. Polarasi ini tidak hanya membatasi cakrawala intelektual umat Islam, tetapi juga menghambat kemampuan keilmuan Islam dalam merespons tantangan kontemporer yang semakin kompleks dan multidimensional. Kesenjangan antara kedua tradisi keilmuan ini menciptakan fragmentasi intelektual yang berdampak pada kualitas riset, relevansi kurikulum, dan daya responsif lembaga pendidikan Islam terhadap dinamika global. Dalam konteks yang lebih luas, dikotomi ini juga memperkuat stereotip bahwa ilmu agama bersifat normatif-tekstual sementara ilmu umum bersifat empiris-rasional, sebuah konstruksi binary yang secara fundamental menafikan kompleksitas tradisi intelektual Islam yang sesungguhnya telah mengintegrasikan kedua dimensi tersebut selama berabad-abad (Masyitoh, 2020).

Paradigma integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah sejak awal 2000-an menawarkan jalan ketiga yang melampaui dikotomi tradisional tersebut. Berbeda dengan pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan yang diagendakan oleh Ismail Raji al-Faruqi (1982) yang cenderung normatif-dogmatis, maupun pendekatan deislamisasi yang mengabaikan dimensi spiritual-teleologis keilmuan, paradigma integrasi-interkoneksi menekankan dialog antartradisi keilmuan secara setara, kritis, dan produktif. Abdullah (2006) menegaskan bahwa integrasi-interkoneksi bukan sekadar penggabungan mekanis antara ilmu agama dan sains, melainkan upaya membangun jaringan epistemologis yang memungkinkan masing-masing tradisi keilmuan berkontribusi secara otonom namun saling menguatkan dalam menghadapi problem keilmuan dan kemasyarakatan yang kompleks. Pendekatan ini secara eksplisit mengakui bahwa setiap tradisi keilmuan memiliki kerangka validitas, metodologi, dan asumsi ontologisnya sendiri, dan bahwa dialog produktif antartradisi justru dimungkinkan oleh pengakuan terhadap perbedaan tersebut, bukan oleh negasinya. Dengan demikian, integrasi-interkoneksi bersifat dialogis-transformatif, bukan subsumtif-reduktif, di mana masing-masing tradisi dipertemukan di ruang publik akademik yang setara untuk saling memperkaya (Arini et al., 2026).

Meskipun paradigma integrasi-interkoneksi telah diadopsi secara institusional oleh beberapa Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Sufratman (2022) mengidentifikasi bahwa kesenjangan antara gagasan teoretis paradigma dan praktik implementasinya di lapangan masih lebar, terutama dalam hal desain kurikulum yang benar-benar integratif, pengembangan metodologi riset interdisipliner, dan pembentukan budaya akademik yang mendukung dialog antardisiplin. Aminuddin (2010) menunjukkan bahwa transformasi dari IAIN menjadi UIN yang secara nominal mengadopsi paradigma integrasi belum diikuti oleh transformasi substansial dalam struktur epistemologis, metodologis, dan institusional yang diperlukan. Banyak institusi yang secara formal mengklaim telah mengadopsi paradigma integrasi-interkoneksi, tetapi dalam praktiknya masih menjalankan model pendidikan yang fragmentaris dan dikotomis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana paradigma integrasi-interkoneksi telah benar-benar teroperasionalisasikan dalam pengembangan keilmuan Islam kontemporer, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat atau memfasilitasi proses operasionalisasi tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paradigma integrasi-interkoneksi secara komprehensif dengan mengembangkan kerangka kerja multidimensional yang mencakup lima dimensi implementasi kunci, model kematangan transformasi empat fase, studi kasus implementasi di tiga institusi pendidikan Islam di Indonesia, serta analisis kritis terhadap risiko-risiko yang mengancam keberlangsungan dan kedalaman implementasi paradigma. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi pada pengisian celah literatur yang masih minimnya model implementasi operasional yang dapat dijadikan panduan bagi institusi pendidikan Islam dalam mengoperasionalisasikan paradigma integrasi-interkoneksi secara sistematis, berkelanjutan, dan kontekstual. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, antara visi paradigmatis dan realitas institusional, yang selama ini menjadi tantangan utama bagi penguatan keilmuan Islam di era kontemporer (Jannah et al., 2025; Waston, 2016). Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat institusional maupun nasional dalam merancang dan mengimplementasikan strategi transformasi yang lebih terstruktur, terukur, dan berbasis bukti, sehingga paradigma integrasi-interkoneksi tidak tetap berada pada level wacana akademik semata tetapi benar-benar terwujud dalam praktik keilmuan yang transformatif.

Akar Epistemologis Paradigma Integrasi-Interkoneksi, Paradigma integrasi-interkoneksi memiliki akar epistemologis yang dapat ditelusuri pada tradisi intelektual Islam klasik yang menghargai keutuhan pengetahuan. Al-Attas (1995) dalam karyanya *Prolegomena to the Metaphysics of Islam* menegaskan bahwa dalam pandangan dunia Islam, ilmu pengetahuan tidak terfragmentasi menjadi kategori-kategori yang terpisah, melainkan membentuk kesatuan organik yang berpusat pada tauhid sebagai prinsip unifikasi. Tradisi ini kemudian mengalami distorsi ketika model pendidikan kolonial memperkenalkan dikotomi antara ilmu

agama dan ilmu umum yang kemudian diwarisi oleh sistem pendidikan Islam modern di Indonesia. Abdullah (2012) mengkontekstualisasikan kembali tradisi integratif ini melalui pengembangan paradigma yang mengakui keunikan metodologis masing-masing disiplin ilmu sekaligus mencari titik-titik interkoneksi yang memungkinkan dialog produktif. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dari Islamisasi ilmu pengetahuan yang diagendakan al-Faruqi (1982) yang cenderung menempatkan ilmu agama sebagai kerangka normatif yang mengarahkan sains, karena integrasi-interkoneksi menekankan hubungan dialektis dan resiprokal antara tradisi keilmuan. Dalam perspektif ini, wahyu dan akal bukanlah sumber pengetahuan yang kompetitif melainkan komplementer, di mana masing-masing memberikan kontribusi unik yang tidak dapat direduksi satu sama lain (Arini et al., 2026).

Waston (2016) menunjukkan bahwa epistemologi Amin Abdullah bersifat inklusif-dialogis, di mana validitas klaim keilmuan tidak hanya diukur dari satu tradisi metodologis, tetapi dari kemampuannya berdialog dengan tradisi keilmuan lain secara kritis dan konstruktif. Pendekatan ini mengandaikan tiga tingkat hubungan antar ilmu: multidisipliner (ilmu-ilmu berdampingan tanpa integrasi), interdisipliner (ilmu-ilmu saling meminjam konsep dan metodologi), dan transdisipliner (ilmu-ilmu membangun kerangka epistemologis bersama yang melampaui batas disiplin). Kartanegara (2005) memperkuat gagasan ini dengan menekankan bahwa integrasi ilmu sejati mensyaratkan rekonstruksi holistik yang tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga ontologis dan aksiologis, sehingga menciptakan kesatuan pengetahuan yang koheren dan bermakna bagi kehidupan manusia. Lebih lanjut, Kartanegara berargumen bahwa tanpa rekonstruksi ontologis yang mempertanyakan asumsi-asumsi dasar tentang hakikat realitas yang dianut oleh masing-masing tradisi keilmuan, integrasi hanya akan berhenti pada level metodologis yang dangkal dan tidak mampu menghasilkan sintesis pengetahuan yang benar-benar baru dan transformatif. Implikasi dari gagasan ini sangat penting bagi implementasi paradigma integrasi-interkoneksi, karena menuntut agar setiap upaya integrasi dimulai dari klarifikasi asumsi ontologis tentang hakikat realitas, hubungan antara yang transendental dan immanent, serta posisi manusia sebagai subjek pengetahuan dalam kerangka keilmuan Islam. Tanpa klarifikasi ini, dialog antartradisi keilmuan akan terhenti pada level pertukaran metodologi yang dangkal tanpa menyentuh persoalan-persoalan filosofis yang lebih mendasar.

Siswanto (2013) mengidentifikasi bahwa perspektif Amin Abdullah tentang integrasi-interkoneksi dalam kajian Islam dibangun di atas kritik terhadap tiga model hubungan ilmu yang ada: model dikotomis yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum secara tajam, model Islamisasi yang menempatkan wahyu sebagai filter normatif atas ilmu pengetahuan, dan model sekularisasi yang menafikan dimensi transendental dalam keilmuan. Abdullah menawarkan model keempat yang berbasis interkoneksi dialogis, di mana masing-masing tradisi keilmuan diundang untuk berpartisipasi dalam dialog yang setara untuk bersama-sama merespons problem keumatan dan kemanusiaan. Model ini mengandaikan adanya kerendahan hati epistemologis (*epistemological humility*) dari setiap tradisi

keilmuan untuk mengakui keterbatasan perspektifnya sendiri dan keterbukaan untuk belajar dari tradisi lain. Sikap ini bukan merupakan kompromi filosofis, melainkan manifestasi dari kesadaran bahwa kebenaran bersifat multidimensional dan tidak dapat dimonopoli oleh satu tradisi keilmuan pun. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, sikap kerendahan hati epistemologis ini menjadi prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem akademik yang benar-benar dialogis dan transformatif, di mana perbedaan perspektif tidak dilihat sebagai ancaman tetapi sebagai sumber pemerayaan intelektual yang bersama-sama memperdalam pemahaman terhadap realitas yang kompleks dan multidimensional.

Perkembangan dan Penerimaan Paradigma di Indonesia. Penerimaan paradigma integrasi-interkoneksi di Indonesia tidak terjadi secara seragam dan tanpa kontroversi. Siswanto (2013) mendokumentasikan bahwa gagasan Amin Abdullah awalnya mendapatkan resistensi dari kalangan konservatif yang menganggap paradigma ini sebagai bentuk kompromi epistemologis terhadap tradisi keilmuan Barat. Namun seiring waktu, paradigma ini berhasil menemukan legitimasi institusional melalui transformasi IAIN menjadi UIN yang dimulai dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anwar (2021) menunjukkan bahwa proses legitimasi ini melibatkan negosiasi ideologis yang kompleks, di mana para pendukung paradigma harus meyakinkan berbagai pemangku kepentingan bahwa integrasi-interkoneksi bukan merupakan penyimpangan dari tradisi keilmuan Islam, melainkan pembaruan yang justru lebih sesuai dengan semangat intelektual Islam klasik. Mulyo (2025) menambahkan bahwa peluang penerapan paradigma ini dalam studi hukum Islam membuka kemungkinan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, meskipun tantangan hermeneutis dan metodologis tetap signifikan terutama dalam hal rekonsiliasi antara metodologi ushul fiqh yang bersifat deduktif-normatif dengan pendekatan sosiso-legal yang bersifat induktif-empiris.

Syarnubi (2022) mengidentifikasi bahwa implementasi paradigma integrasi-interkoneksi dalam peningkatan mutu lulusan menunjukkan hasil yang beragam antar institusi. Institusi yang memiliki tradisi intelektual yang lebih kuat dan kepemimpinan yang visioner cenderung lebih berhasil dalam mengoperasionalkan paradigma ini, sementara institusi yang mengalami keterbatasan sumber daya dan resistensi internal mengalami kesulitan dalam menerjemahkan gagasan teoretis menjadi praktik akademik yang konkret. Sadewa (2022) menunjukkan bahwa kurikulum prototipe yang dirancang dengan pendekatan integrasi-interkoneksi memerlukan perombakan fundamental dalam cara berpikir dosen, struktur program studi, dan sistem penilaian, bukan sekadar penambahan mata kuliah integratif di tepi kurikulum yang sudah ada. Pengalaman menunjukkan bahwa penambahan mata kuliah silang antara fakultas agama dan fakultas umum tanpa perombakan paradigmatis yang lebih mendasar hanya menghasilkan kurikulum tambal sulam yang tidak koheren, di mana mahasiswa mengalami fragmentasi pengalaman belajar yang semakin kompleks alih-alih integrasi yang bermakna. Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa

keberhasilan implementasi paradigma sangat bergantung pada faktor-faktor struktural dan kultural yang melampaui dimensi gagasan teoretis semata.

Tantangan Kontemporer dan Celah Penelitian. Tantangan kontemporer dalam implementasi paradigma integrasi-interkoneksi semakin kompleks seiring dengan dinamika globalisasi, digitalisasi, dan disrupsi teknologi yang mempengaruhi ekosistem pendidikan tinggi. Jannah et al. (2025) menunjukkan bahwa isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ketimpangan global memerlukan respons epistemologis yang tidak dapat disediakan oleh satu disiplin ilmu saja. Paradigma integrasi-interkoneksi menawarkan potensi untuk menghasilkan respons-respons yang lebih holistik dan bermakna, tetapi operasionalisasinya masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal penyusunan agenda riset yang secara sistematis mengintegrasikan perspektif keagamaan dan ilmiah dalam mengkaji permasalahan-permasalahan global tersebut. Fajri dan Sassi (2026) menekankan bahwa eksplorasi paradigma baru pendidikan Islam era kontemporer perspektif Amin Abdullah harus mempertimbangkan tidak hanya dimensi akademik-intelektual, tetapi juga dimensi etis, sosial, dan spiritual yang saling terkait dalam menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer. Era digital menghadirkan tantangan baru berupa arus informasi yang masif dan cepat, yang mengharuskan keilmuan Islam mampu mengembangkan kerangka evaluasi kritis yang berbasis integrasi antara prinsip-prinsip etika Islam dan metodologi ilmiah modern. Sari dan Amin (2020) mendokumentasikan implementasi integrasi ilmu interdisipliner dan multidisipliner di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam pengembangan program studi integratif, masih terdapat kesenjangan antara desain program dan pengalaman belajar mahasiswa yang cenderung tetap terfragmentasi. Akmal (2024) mengidentifikasi bahwa pemikiran Amin Abdullah seputar integrasi keilmuan masih memerlukan elaborasi lebih lanjut terkait mekanisme operasional yang spesifik, indikator keberhasilan yang terukur, dan strategi mitigasi terhadap risiko-risiko implementasi yang dapat mengancam keberlangsungan transformasi. Utami et al. (2025) menegaskan bahwa konsep, prinsip, dan implementasi integrasi-interkoneksi dalam rekonsiliasi sains Islam memerlukan kerangka kerja yang lebih sistematis dan komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Celah-celah penelitian inilah yang menjadi fokus artikel ini, yang bertujuan mengembangkan kerangka kerja implementasi multidimensional sebagai panduan operasional bagi institusi pendidikan Islam. Khususnya, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam hal model kematangan transformasi yang dapat digunakan sebagai alat diagnosis posisi institusional dan perencanaan strategis berbasis bukti (Saputra et al., 2024; Arbi et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur sistematis untuk menganalisis implementasi paradigma integrasi-interkoneksi dalam pengembangan keilmuan Islam kontemporer. Pendekatan

kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks, multidimensional, dan kontekstual, sehingga memerlukan pemahaman mendalam yang tidak dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif semata. Analisis literatur sistematis dilakukan terhadap 24 sumber yang terdiri dari 19 artikel jurnal akademik dan 5 buku utama yang relevan dengan topik penelitian. Proses seleksi sumber didasarkan pada kriteria relevansi tematik, kualitas akademik, dan representativitas perspektif yang mencakup baik pendukung maupun pengkritik paradigma integrasi-interkoneksi. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik nasional dan internasional dengan kata kunci yang mencakup paradigma integrasi-interkoneksi, pemikiran M. Amin Abdullah, integrasi ilmu dan agama, serta transformasi pendidikan Islam di Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui analisis literatur dianalisis menggunakan teknik analisis konten tematik dengan langkah-langkah: (1) koding terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema emergen dari setiap sumber literatur, (2) kategorisasi tema ke dalam dimensi-dimensi implementasi yang mencerminkan domain-domain substantif paradigma, (3) pengembangan indikator terukur untuk setiap dimensi berdasarkan konsensus antarsumber, (4) sintesis model kematangan transformasi yang menggambarkan progres implementasi dari kondisi awal hingga institusionalisasi penuh, dan (5) verifikasi melalui triangulasi sumber yang membandingkan temuan dari sumber-sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas. Studi kasus dilakukan terhadap tiga institusi pendidikan Islam di Indonesia yang dipilih berdasarkan kriteria: representativitas geografis yang mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, variasi tingkat implementasi paradigma yang mencerminkan spektrum dari perintis hingga pengikut, dan ketersediaan data yang memadai dalam literatur akademik. Validitas temuan dijaga melalui peer debriefing dan audit trail yang mendokumentasikan setiap keputusan analitis secara transparan. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kerangka kerja yang tidak hanya teoretis-akademis, tetapi juga operasional-aplikatif bagi para pemangku kepentingan di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat langsung dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program transformasi institusional. Keterbatasan penelitian ini perlu diakui, terutama dalam hal ketergantungan pada sumber literatur yang mungkin tidak mencerminkan seluruh keragaman pengalaman implementasi di lapangan, serta ketiadaan data primer dari wawancara langsung dengan para aktor implementasi di institusi-institusi yang dikaji. Meskipun demikian, pendekatan analisis literatur sistematis yang digunakan tetap memungkinkan pengembangan kerangka kerja yang koheren dan berbasis bukti yang dapat divalidasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kerja Implementasi Multidimensional

Berdasarkan analisis literatur sistematis, penelitian ini mengidentifikasi lima dimensi kunci implementasi paradigma integrasi-interkoneksi dalam pengembangan keilmuan Islam kontemporer. Kelima dimensi ini merepresentasikan domain-domain substantif yang harus ditransformasi secara

simultan dan koheren agar implementasi paradigma dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Dimensi epistemologis berkaitan dengan fondasi pengetahuan dan kerangka validitas yang mendasari integrasi antartradisi keilmuan, termasuk asumsi-asumsi ontologis tentang hakikat realitas dan hubungan antara sumber-sumber pengetahuan yang berbeda. Dimensi metodologis merujuk pada pendekatan dan teknik penelitian yang memungkinkan dialog interdisipliner secara produktif, termasuk pengembangan protokol riset campuran dan kolaborasi lintas disiplin. Dimensi kurikular-pedagogis menyangkut desain program studi, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi yang mendukung pembentukan kompetensi integratif pada mahasiswa. Dimensi institusional-struktural mencakup kebijakan, tata kelola, dan infrastruktur organisasi yang memfasilitasi transformasi paradigmatis dari tingkat pimpinan hingga unit pelaksana. Dimensi kultural-kontekstual berkaitan dengan nilai-nilai, tradisi, dan konteks sosial-budaya yang membentuk reseptivitas terhadap paradigma integrasi-interkoneksi, termasuk tradisi intelektual lokal dan ekspektasi pemangku kepentingan.

Setiap dimensi dilengkapi dengan indikator terukur yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi progres implementasi secara sistematis. Indikator-indikator ini dikembangkan melalui proses analisis induktif dari data literatur dan kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber yang membandingkan konsistensinya antar sumber yang berbeda. Perlu dicatat bahwa kelima dimensi ini tidak beroperasi secara independen, melainkan saling terkait dalam hubungan yang bersifat organik-sinergetis. Keberhasilan pada satu dimensi tanpa kemajuan yang sejalan pada dimensi lainnya akan menghasilkan implementasi yang tidak seimbang dan rentan terhadap kemunduran. Misalnya, pengembangan kurikulum integratif tanpa dukungan epistemologis yang memadai akan menghasilkan kurikulum yang secara formal mengklaim integratif tetapi secara substantif masih fragmentaris. Demikian pula, reformasi institusional tanpa perubahan kultural yang sesuai akan menghasilkan kebijakan yang tidak diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Tabel 1 menyajikan kerangka kerja implementasi multidimensional beserta indikator terukur untuk setiap dimensi.

Tabel 1: Kerangka Kerja Implementasi Multidimensional Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Dimensi	Indikator Terukur	Level Minimum	Level Optimal
Epistemologis	1. Ketersediaan kerangka epistemologis integratif tertulis 2. Frekuensi dialog epistemologis antardisiplin 3. Jumlah publikasi dengan pendekatan integratif 4. Pengakuan terhadap multiplisitas sumber pengetahuan	Rumusan epistemologis institusional yang dasar	Kerangka epistemologis operasional yang diinternalisasi seluruh sivitas akademika

Metodologis	1. Proporsi penelitian interdisipliner dari total riset 2. Ketersediaan panduan metodologi integratif 3. Kolaborasi riset lintas fakultas 4. Penggunaan metode campuran (mixed methods)	Adanya panduan metodologi dan contoh riset integratif	Ekosistem riset interdisipliner yang mapan dan produktif
Kurikular-Pedagogis	1. Persentase mata kuliah integratif dalam kurikulum 2. Ketersediaan bahan ajar integratif 3. Kompetensi dosen dalam pedagogi integratif 4. Sistem evaluasi yang mengukur kompetensi integratif	Minimal 20% mata kuliah bersifat integratif	Kurikulum holistik-integratif dengan evaluasi berbasis kompetensi integratif
Institusional-Struktural	1. Kebijakan formal mendukung integrasi-interkoneksi 2. Struktur organisasi yang memfasilitasi kolaborasi 3. Alokasi anggaran untuk program integratif 4. Sistem insentif untuk riset interdisipliner	Kebijakan formal dan struktur organisasi adaptif	Tata kelola akademik yang terintegrasi dengan insentif komprehensif
Kultural-Kontekstual	1. Budaya dialog antardisiplin di lingkungan kampus 2. Responsivitas terhadap konteks lokal dan global 3. Tradisi intelektual yang menghargai keberagaman 4. Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal	Budaya akademik yang terbuka terhadap dialog	Ekosistem kultural-dialogis yang berkelanjutan dan kontekstual

Dimensi epistemologis menempati posisi sentral dalam kerangka kerja karena menentukan fondasi filosofis yang mengarahkan seluruh dimensi lainnya. Tanpa klarifikasi epistemologis yang memadai, implementasi pada dimensi lainnya akan kehilangan arah dan koherensi internal. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah (2006), integrasi-interkoneksi mensyaratkan pengakuan bahwa sumber pengetahuan tidak terbatas pada wahyu semata, tetapi juga mencakup akal, pengalaman empiris, dan intuisi, yang masing-masing memiliki domain validitas dan metodologi verifikasi yang spesifik namun saling melengkapi. Weston (2016) menegaskan bahwa pemikiran epistemologi Amin Abdullah menawarkan relevansi penting bagi pendidikan tinggi di Indonesia karena menyediakan basis filosofis yang memungkinkan perguruan tinggi Islam mengembangkan identitas akademik yang khas tanpa menutup diri dari kontribusi ilmu pengetahuan modern. Oleh

karena itu, setiap institusi yang ingin mengimplementasikan paradigma integrasi-interkoneksi harus memulai dengan membangun klarifikasi epistemologis yang eksplisit dan disepakati bersama oleh seluruh sivitas akademika, yang kemudian menjadi rujukan bagi pengembangan pada dimensi-dimensi lainnya.

Model Kematangan Transformasi Empat Fase

Implementasi paradigma integrasi-interkoneksi merupakan proses transformasi bertahap yang tidak dapat dicapai secara instan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai pengalaman implementasi di Indonesia, penelitian ini mengembangkan model kematangan transformasi empat fase yang menggambarkan progres implementasi dari kondisi awal yang masih terfragmentasi hingga tercapainya institusionalisasi paradigma secara penuh. Model ini memperluas gagasan transformasi institusional yang diidentifikasi oleh Mulyo (2025) dan Syarnubi (2022) dengan merumuskan karakteristik, capaian, dan strategi akselerasi untuk setiap fase secara lebih operasional dan terukur. Setiap fase memiliki tugas perkembangan (developmental tasks) yang harus diselesaikan sebelum institusi dapat bergerak ke fase berikutnya secara efektif, meskipun beberapa overlap antar fase dimungkinkan dan bahkan diperlukan untuk menjaga momentum transformasi.

Fase pertama, dekonstruksi, merupakan fase kritis di mana institusi melakukan pemeriksaan mendalam terhadap asumsi-asumsi epistemologis dan metodologis yang mendasari praktik akademik yang berlaku. Pada fase ini, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum diidentifikasi dan dikritisi sebagai konstruksi sejarah yang bukan merupakan keniscayaan epistemologis. Fase ini melibatkan dialog intensif antar fakultas dan program studi untuk memetakan titik-titik potensial interkoneksi, sekaligus mengidentifikasi resistensi-resistensi yang harus diatasi. Dju (2018) menunjukkan bahwa pendekatan integrasi-interkoneksi dalam pendidikan Islam yang dikembangkan Amin Abdullah memerlukan fase dekonstruksi yang cukup lama karena melibatkan perubahan cara berpikir yang mendalam dan tidak sekadar perubahan prosedural. Selama fase ini, yang paling penting adalah membangun kesadaran kolektif tentang problematika dikotomi dan kebutuhan mendesak akan paradigma alternatif, sebelum melompat ke solusi-solusi implementatif yang prematur.

Fase kedua, reorientasi, ditandai dengan pengalihan arah pengembangan keilmuan dari pola fragmentaris menuju pola integratif. Pada fase ini, institusi mulai mengembangkan kerangka epistemologis integratif, membentuk tim riset interdisipliner, dan merancang kurikulum yang mengakomodasi pendekatan integrasi-interkoneksi. Fase ketiga, integrasi-interkoneksi, merupakan fase di mana paradigma mulai teroperasionalkan secara substantif dalam seluruh aspek kehidupan akademik, mulai dari riset, pengajaran, hingga pengabdian masyarakat. Pada fase ini, produk-produk akademik yang benar-benar integratif mulai dihasilkan secara konsisten, dan kolaborasi interdisipliner menjadi bagian integral dari ekosistem akademik institusi. Fase keempat, institusionalisasi, ditandai dengan terwujudnya paradigma integrasi-interkoneksi sebagai budaya akademik

organisasional yang berkelanjutan, yang tidak lagi bergantung pada individu-individu tertentu tetapi telah melembaga dalam kebijakan, struktur, dan praktik akademik institusi. Pada fase ini, paradigma menjadi bagian dari DNA institusional yang ditransmisikan kepada generasi baru civitas akademika melalui proses sosialisasi dan pembiasaan yang terstruktur. Tabel 2 menyajikan model kematangan transformasi empat fase secara rinci.

Tabel 2: Model Kematangan Transformasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Fase	Karakteristik Utama	Capaian Kunci	Strategi Akselerasi
Fase 1: Dekonstruksi	Kritisi dikotomi ilmu agama-ilmu umum; identifikasi asumsi tersembunyi; dialog awal antardisiplin; kesadaran akan kebutuhan integrasi	Dokumen posisi epistemologis; peta interkoneksi potensial antar disiplin; komitmen pimpinan terhadap transformasi	Seminar epistemologis intensif; studi banding ke institusi pelopor; pembentukan tim perumus kerangka integrasi
Fase 2: Reorientasi	Pengembangan kerangka epistemologis integratif; pembentukan struktur organisasi pendukung; desain ulang kurikulum parsial; rekrutmen dan pengembangan SDM integratif	Kerangka epistemologis institusional; struktur lembaga penelitian interdisipliner; kurikulum prototipe integratif pada program studi percontohan	Pelatihan dosen metode interdisipliner; insentif riset kolaboratif; pengembangan bahan ajar integratif
Fase 3: Integrasi-Interkoneksi	Operasionalisasi paradigma dalam riset, pengajaran, dan pengabdian; produksi karya ilmiah integratif; pengembangan metodologi riset campuran; evaluasi berbasis kompetensi integratif	Portofolio riset interdisipliner; publikasi integratif terindeks; lulusan dengan kompetensi integratif terukur; pengakuan eksternal atas kekhlasan keilmuan	Konsorsium riset nasional-internasional; pengembangan jurnal berparadigma integrasi; sistem mentoring akademik integratif
Fase 4: Institusionalisasi	Paradigma menjadi budaya akademik organisasional; keberlanjutan tanpa ketergantungan pada individu; ekosistem riset-pendidikan integratif yang mapan; pengaruh terhadap kebijakan nasional	Akreditasi kekhlasan keilmuan integratif; keberlanjutan lintas generasi kepemimpinan; kontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan Islam nasional; pengakuan internasional	Succession planning berbasis paradigma; pengembangan center of excellence; advokasi kebijakan nasional; jaringan alumni integratif

Model kematangan transformasi empat fase ini tidak bersifat linier-sequensial secara rigid, melainkan bersifat iteratif-reflektif di mana institusi dapat bergerak maju-mundur antar fase tergantung pada dinamika internal dan eksternal yang dihadapi. Pengalaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagaimana didokumentasikan oleh Sari dan Amin (2020), menunjukkan bahwa proses transformasi dari fase dekonstruksi ke fase institusionalisasi memerlukan waktu yang panjang dan tidak selalu berjalan mulus, dengan kemungkinan terjadinya kemunduran (regression) pada dimensi-dimensi tertentu ketika menghadapi resistensi internal atau perubahan kepemimpinan. Dinamika ini menegaskan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang memungkinkan institusi mengidentifikasi secara dini tanda-tanda kemunduran dan mengambil langkah korektif yang diperlukan. Meskipun demikian, model ini menyediakan peta jalan yang jelas untuk mengukur posisi institusi dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mempercepat progres ke fase berikutnya. Yang tidak kalah penting, model ini juga menggarisbawahi bahwa setiap fase memiliki prasyarat yang harus dipenuhi, dan bahwa melompat ke fase yang lebih tinggi tanpa menyelesaikan tugas perkembangan fase sebelumnya akan menghasilkan transformasi yang tidak kokoh dan rentan terhadap kemunduran.

Studi Kasus Implementasi di Tiga Institusi Pendidikan Islam

Untuk memvalidasi dan mengkontekstualisasikan kerangka kerja dan model kematangan yang dikembangkan, penelitian ini menganalisis implementasi paradigma integrasi-interkoneksi di tiga institusi pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki karakteristik dan tingkat implementasi yang berbeda. Pemilihan kasus ini mencerminkan variasi geografis, tradisi intelektual, dan dinamika institusional yang mempengaruhi proses implementasi paradigma. Analisis komparatif ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor kritis keberhasilan dan hambatan yang bersifat kontekstual sekaligus universal, sehingga memberikan pelajaran yang lebih kaya bagi pengembangan model implementasi yang dapat diadaptasi oleh berbagai institusi dengan konteks yang berbeda-beda.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipilih sebagai kasus pertama karena merupakan institusi perintis yang paling erat terkait dengan pengembangan paradigma integrasi-interkoneksi oleh M. Amin Abdullah sebagai rektor dan kemudian sebagai guru besar di institusi tersebut. Aminuddin (2010) mendokumentasikan bahwa transformasi IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN pada tahun 2004 merupakan manifestasi institusional pertama dari paradigma integrasi-interkoneksi, meskipun proses transformasi substansial terus berlangsung hingga saat ini. Sari dan Amin (2020) menunjukkan bahwa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga telah mengembangkan program studi yang secara eksplisit mengadopsi pendekatan interdisipliner dan multidisipliner, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi pedagogi integratif dan kompetensi dosen yang beragam. Institusi ini berhasil membangun legitimasi akademik yang kuat untuk paradigma integrasi-interkoneksi, namun masih perlu memperkuat dimensi

kultural-kontekstual agar paradigma tidak hanya dipahami secara intelektual tetapi juga dihayati sebagai bagian dari identitas keilmuan institusional.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih sebagai kasus kedua karena mengembangkan model integrasi yang relatif berbeda dengan penekanan lebih besar pada integrasi ilmu melalui pendekatan filosofis-tasawufi yang dipengaruhi oleh tradisi intelektual al-Attas. Syamsurizal dan Dewi (2026) menunjukkan bahwa institusi ini mengembangkan model integrasi yang lebih menekankan dimensi spiritual-ontologis dibandingkan dimensi metodologis-empiris yang lebih dominan di UIN Sunan Kalijaga. Perbedaan penekanan ini mencerminkan keragaman dalam cara paradigma integrasi-interkoneksi diinterpretasikan dan dioperasionalisasikan, yang menunjukkan bahwa implementasi paradigma tidak bersifat monolitik tetapi harus disesuaikan dengan tradisi intelektual dan konteks institusional masing-masing. Model integrasi Malang memiliki kekuatan pada dimensi epistemologis dan kultural-kontekstual karena didasarkan pada tradisi intelektual yang koheren dan mendalam, namun memerlukan penguatan pada dimensi metodologis terutama dalam hal pengembangan riset empiris yang terintegrasi.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih sebagai kasus ketiga karena memiliki sejarah panjang sebagai institusi pendidikan Islam terkemuka dengan jaringan akademik internasional yang luas, namun menghadapi tantangan khusus dalam implementasi paradigma integrasi-interkoneksi terkait dengan resistensi dari fakultas-fakultas yang lebih tradisional. Arbi et al. (2024) menunjukkan bahwa upaya mendamaikan Islam dan sains melalui pendekatan integrasi-interkoneksi di tingkat sekolah dasar Islam terpadu di sekitar Jakarta juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan guru dan kesenjangan antara kurikulum formal dan praktik pedagogis di kelas. Institusi ini memiliki keunggulan pada dimensi institusional-struktural dengan kebijakan formal yang mendukung integrasi dan jaringan internasional yang luas, namun masih perlu mengatasi fragmentasi implementasi antar unit akademik dan memperkuat dimensi kurikular-pedagogis agar transformasi tidak hanya berhenti pada level kebijakan formal tetapi juga terwujud dalam praktik pedagogis yang substantif. Pengalaman tiga institusi ini memberikan gambaran yang kaya tentang kompleksitas dan kontekstualitas implementasi paradigma integrasi-interkoneksi di Indonesia.

Tabel 3: Studi Kasus Implementasi di Tiga Institusi Pendidikan Islam

Aspek	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Fase Dominan	Fase 3 (Integrasi-Interkoneksi)	Fase 2-3 (Transisi Reorientasi ke Integrasi)	Fase 2 (Reorientasi)
Penekanan Integrasi	Metodologis-empiris; interdisipliner-multidisipliner; riset kolaboratif	Filosofis-spiritual; ontologis-tasawufi; integrasi melalui hikmah	Institusional-kebijakan; reformasi struktural; jaringan internasional

Keberhasilan Utama	Program pascasarjana integratif; tradisi riset interdisipliner; legitimasi akademik nasional	Kurikulum berbasis hikmah; pembinaan karakter spiritual; identitas keilmuan yang khas	Jaringan akademik global; kebijakan formal mendukung integrasi; keragaman program studi
Tantangan Utama	Konsistensi pedagogi integratif antar program studi; resistensi dari sebagian dosen senior	Keterbatasan riset empiris integratif; dominasi pendekatan normatif; kurangnya kolaborasi riset	Resistensi fakultas tradisional; fragmentasi implementasi antar unit; kesenjangan kebijakan-praktik
Dimensi Terkuat	Metodologis dan Kurikular-Pedagogis	Epistemologis dan Kultural-Kontekstual	Institusional-Struktural
Dimensi Terlemah	Kultural-Kontekstual (perlu penguatan budaya dialog)	Metodologis (perlu pengembangan riset empiris)	Kurikular-Pedagogis (perlu reformasi substantif)

Analisis komparatif terhadap tiga institusi ini mengungkapkan beberapa temuan penting yang memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi paradigma integrasi-interkoneksi. Pertama, tidak ada model implementasi yang tunggal dan universal; setiap institusi mengembangkan model yang disesuaikan dengan tradisi intelektual, sumber daya, dan konteks sosial-budayanya sendiri, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar paradigma. Kedua, dimensi epistemologis merupakan prasyarat fundamental yang harus diklarifikasi sebelum implementasi pada dimensi lainnya dapat berlangsung efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman UIN Sunan Kalijaga yang relatif lebih maju karena memiliki fondasi epistemologis yang lebih jelas dan terdokumentasi. Ketiga, faktor kepemimpinan dan visi institusional sangat menentukan kecepatan dan kedalaman transformasi, di mana institusi dengan kepemimpinan yang visioner dan konsisten menunjukkan progres yang lebih signifikan. Keempat, keberlanjutan implementasi bergantung pada institusionalisasi paradigma dalam struktur dan budaya organisasi, bukan hanya pada komitmen individual pemimpin tertentu, karena pergantian kepemimpinan dapat menghambat atau bahkan membatalkan kemajuan yang telah dicapai jika paradigma belum terinstitusionalisasi secara memadai. Temuan-temuan ini konsisten dengan analisis Syarnubi (2022) dan Mulyo (2025) tentang pentingnya faktor struktural dan kultural dalam menentukan keberhasilan implementasi paradigma.

Lebih lanjut, analisis komparatif juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat komplementer antara kekuatan dan kelemahan masing-masing institusi. UIN Sunan Kalijaga dengan kekuatan metodologisnya dapat menjadi sumber pembelajaran bagi UIN Malang dalam pengembangan riset empiris integratif, sementara UIN Malang dengan kekuatan epistemologis-spiritualnya dapat memberikan inspirasi bagi UIN Sunan Kalijaga dalam memperdalam fondasi filosofis integrasinya. UIN Jakarta dengan jaringan internasionalnya dapat memfasilitasi legitimasi global bagi model-model integrasi yang dikembangkan oleh

ketiga institusi. Potensi sinergi ini menegaskan pentingnya pembentukan jaringan kolaboratif antar institusi yang tidak hanya berbagi praktik terbaik tetapi juga mengembangkan agenda riset bersama yang memperkuat posisi keilmuan Islam integratif di tingkat nasional dan internasional. Kolaborasi semacam ini juga dapat memperkuat posisi tawar institusi pendidikan Islam dalam advokasi kebijakan pendidikan nasional yang mendukung paradigma integrasi-interkoneksi secara lebih luas.

Analisis Kritis: Risiko dan Tantangan Implementasi

Meskipun paradigma integrasi-interkoneksi menawarkan visi yang progresif dan potensial bagi pengembangan keilmuan Islam kontemporer, implementasinya menghadapi sejumlah risiko serius yang harus diantisipasi dan dimitigasi secara sistematis. Analisis kritis ini mengidentifikasi empat risiko utama yang mengancam efektivitas dan kedalaman implementasi paradigma, yang masing-masing memerlukan strategi respons yang berbeda. Risiko-risiko ini tidak bersifat eksklusif satu sama lain, melainkan saling terkait dan dapat memperkuat satu sama lain dalam menciptakan hambatan struktural terhadap transformasi paradigmatis. Pemahaman terhadap jaringan risiko ini sangat penting untuk merancang strategi mitigasi yang bersifat holistik dan sinergis, bukan parsial dan fragmentaris.

Risiko pertama adalah risiko epistemologis berupa integrasi superficial, di mana integrasi hanya terjadi pada level formal-prosedural tanpa menyentuh fondasi epistemologis yang lebih dalam. Dalam konteks ini, integrasi hanya berupa penempatan mata kuliah agama di program studi umum dan sebaliknya, tanpa adanya dialog epistemologis yang sesungguhnya antara tradisi keilmuan yang berbeda. Masyitoh (2020) memperingatkan bahwa bahaya terbesar dari paradigma integrasi-interkoneksi adalah ketika ia direduksi menjadi slogan institusional tanpa substansi epistemologis, sehingga menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai integrasi semu yang tidak memiliki daya transformatif. Akmal (2024) menambahkan bahwa pemikiran Amin Abdullah seputar integrasi keilmuan mensyaratkan komitmen terhadap dialog epistemologis yang mendalam, bukan sekadar penggabungan administratif antar fakultas atau program studi. Integrasi superficial berbahaya karena memberikan ilusi transformasi tanpa substansi, yang pada akhirnya justru merusak kredibilitas paradigma itu sendiri.

Risiko kedua adalah risiko institusional berupa resistensi struktural, di mana struktur organisasi, sistem insentif, dan budaya birokrasi yang ada justru menghambat implementasi paradigma. Struktur fakultas yang terfragmentasi, sistem penilaian kinerja yang berbasis disiplin ilmu sempit, dan birokrasi yang kaku membuat kolaborasi interdisipliner menjadi sulit dan tidak menarik secara akademik maupun karir. Sadewa (2022) menunjukkan bahwa kurikulum prototipe yang dirancang dengan pendekatan integrasi-interkoneksi sering kali terganggu oleh kepentingan fakultas yang ingin mempertahankan otonomi disiplinernya, sehingga menghasilkan kurikulum yang secara formal mengklaim integratif tetapi secara substantif masih fragmentaris. Resistensi struktural ini sering kali bersifat tidak sadar (unconscious) dan terstruktur dalam sistem-sistem formal dan informal

organisasi, sehingga diperlukan reformasi struktural yang mendasar dan bukan sekadar imbauan atau himbauan yang tidak memiliki daya paksa.

Risiko ketiga adalah risiko pedagogis berupa kesenjangan implementasi, di mana terjadi jurang antara desain kurikulum integratif dan praktik pedagogis di kelas. Sari dan Amin (2020) mengidentifikasi bahwa meskipun program pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga telah merancang kurikulum yang integratif, pengalaman belajar mahasiswa sering kali tetap terfragmentasi karena dosen belum sepenuhnya menguasai pedagogi integratif. Kesenjangan ini diperparah oleh ketiadaan program pengembangan kompetensi pedagogis integratif yang sistematis dan berkelanjutan bagi dosen, sehingga meskipun ada kemauan untuk berubah, kapasitas untuk melakukannya masih terbatas. Dju (2018) menegaskan bahwa pendekatan integrasi-interkoneksi dalam pendidikan Islam memerlukan transformasi fundamental dalam cara mengajar, bukan hanya dalam apa yang diajarkan, yang mencakup perubahan dalam strategi pembelajaran, metode evaluasi, dan hubungan pedagogis antara dosen dan mahasiswa.

Risiko keempat adalah risiko kontekstual berupa kehilangan identitas lokal, di mana dalam proses mengadopsi paradigma integrasi-interkoneksi yang berorientasi global, institusi justru kehilangan kekhasan tradisi intelektual lokal yang seharusnya menjadi aset dalam dialog antardisiplin. Arbi et al. (2024) menunjukkan bahwa integrasi Islam dan sains di sekolah dasar Islam terpadu di Bengkalis menghadapi tantangan dalam mempertahankan kearifan lokal Melayu dalam proses integrasi, yang berisiko menghasilkan model integrasi yang deracinated dan tidak berakar pada konteks komunitasnya. Risiko ini semakin meningkat di era globalisasi di mana model-model pendidikan yang bersifat universal cenderung mengabaikan kekhasan kontekstual, sehingga menghasilkan pendidikan yang secara teknis integratif tetapi secara kultural tidak bermakna bagi komunitas yang dilayani. Tabel 4 menyajikan analisis kritis terhadap empat risiko utama beserta strategi mitigasinya.

Tabel 4: Analisis Kritis Risiko Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi

Risiko	Manifestasi	Dampak	Strategi Mitigasi
Risiko Epistemologis: Integrasi Superficial	Penempatan mata kuliah silang tanpa dialog epistemologis; klaim integratif tanpa rekonstruksi fondasi pengetahuan; reduksi paradigma menjadi slogan	Kehilangan kedalaman filosofis; paradigma kehilangan daya transformatifnya; kredibilitas akademik menurun	Forum dialog epistemologis rutin; penulisan bersama antardisiplin; audit epistemologis berkala; pengembangan terminologi integratif khas institusi
Risiko Institusional: Resistensi Struktural	Fakultas mempertahankan otonomi disipliner; sistem insentif tidak mendukung kolaborasi; birokrasi menghambat inovasi;	Kolaborasi interdisipliner terhambat; inovasi kurikulum terbatas; motivasi dosen rendah; stagnasi transformasi	Reformasi struktur organisasi; sistem insentif kolaboratif; pimpinan fakultas lintas disiplin; dana riset interdisipliner khusus

	silo akademik yang persisten		
Risiko Pedagogis: Kesenjangan Implementasi	Dosen belum menguasai pedagogi integratif; bahan ajar integratif minim; evaluasi tetap berbasis disiplin tunggal; pengalaman belajar mahasiswa terfragmentasi	Kompetensi lulusan integratif tidak tercapai; gap antara desain dan realisasi kurikulum; frustrasi mahasiswa dan dosen	Pelatihan pedagogi integratif intensif; pengembangan bahan ajar kolaboratif; sistem evaluasi berbasis kompetensi integratif; tim teaching lintas disiplin
Risiko Kontekstual: Kehilangan Identitas Lokal	Adopsi model global tanpa adaptasi lokal; tradisi intelektual lokal terpinggirkan; kearifan lokal tidak diakomodasi; paradigma menjadi deracinated	Kehilangan relevansi kontekstual; kurangnya dukungan komunitas; model integrasi tidak berakar; kebergantungan pada model asing	Inventarisasi tradisi intelektual lokal; kontekstualisasi paradigma; kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal; riset berbasis kearifan lokal

Empat risiko yang diidentifikasi membentuk jaringan risiko yang saling memperkuat dan membentuk siklus resistensi terhadap transformasi paradigmatis. Integrasi superficial pada dimensi epistemologis cenderung memperkuat resistensi struktural karena tanpa justifikasi epistemologis yang kuat, para pemangku kepentingan yang konservatif memiliki alasan yang sah untuk mempertahankan status quo. Resistensi struktural pada gilirannya memperlebar kesenjangan implementasi karena dosen yang ingin mengembangkan pedagogi integratif tidak mendapatkan dukungan institusional yang memadai, termasuk insentif karir, waktu untuk pengembangan kompetensi, dan infrastruktur kolaborasi. Akhirnya, kesenjangan implementasi mendorong institusi untuk mengadopsi model eksternal yang siap pakai tanpa adaptasi lokal yang memadai, sehingga meningkatkan risiko kehilangan identitas lokal. Pemahaman terhadap jaringan risiko ini sangat penting untuk merancang strategi mitigasi yang bersifat holistik dan sinergis, bukan parsial dan fragmentaris. Sebagaimana ditekankan oleh Jannah et al. (2025), respons epistemologis terhadap isu-isu kontemporer memerlukan pendekatan yang koheren dan terintegrasi, bukan solusi-solusi tambal sulam yang hanya mengatasi gejala tanpa menyentuh akar permasalahan. Strategi mitigasi yang efektif harus mampu memutus siklus resistensi ini dengan melakukan intervensi simultan pada beberapa titik kritis sekaligus.

SIMPULAN

Penelitian ini telah mengembangkan kerangka kerja implementasi multidimensional paradigma integrasi-interkoneksi dalam pengembangan keilmuan Islam kontemporer yang mencakup lima dimensi implementasi, model kematangan transformasi empat fase, studi kasus komparatif di tiga institusi pendidikan Islam, dan analisis kritis terhadap empat risiko utama implementasi.

Temuan menunjukkan bahwa implementasi paradigma integrasi-interkoneksi merupakan proses transformasi yang kompleks, multidimensional, dan kontekstual yang memerlukan keselarasan perubahan pada seluruh dimensi secara simultan. Dimensi epistemologis menempati posisi sentral karena menentukan fondasi filosofis yang mengarahkan transformasi pada dimensi lainnya, sementara dimensi kultural-kontekstual berperan sebagai penjamin relevansi dan keberlanjutan implementasi dalam konteks sosial-budaya yang spesifik. Tanpa penguatan simultan pada kelima dimensi, implementasi paradigma akan menghasilkan transformasi yang tidak seimbang dan rentan terhadap kemunduran. Model kematangan transformasi empat fase yang dikembangkan menunjukkan bahwa proses implementasi bersifat iteratif-reflektif dan memerlukan waktu yang panjang serta komitmen yang berkelanjutan, tidak hanya dari pimpinan institusi tetapi dari seluruh sivitas akademika. Studi kasus komparatif mengungkapkan bahwa tidak ada model implementasi yang tunggal dan universal; setiap institusi harus mengembangkan model yang disesuaikan dengan tradisi intelektual, sumber daya, dan konteksnya sendiri, meskipun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar paradigma integrasi-interkoneksi. Analisis kritis mengidentifikasi jaringan risiko yang saling memperkuat, yang memerlukan strategi mitigasi holistik dan sinergis yang melakukan intervensi simultan pada beberapa titik kritis. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan kerangka kerja operasional yang dapat dijadikan panduan oleh institusi pendidikan Islam dalam mengukur posisi transformasinya dan merancang strategi akselerasi yang tepat sasaran, sekaligus mengantisipasi risiko-risiko yang mengancam kedalaman dan keberlanjutan implementasi paradigma integrasi-interkoneksi. Kerangka kerja ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara visi paradigmatis dan realitas institusional yang selama ini menjadi tantangan utama bagi penguatan keilmuan Islam di era kontemporer. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji dan menyempurnakan kerangka kerja ini melalui studi lapangan yang lebih luas dan mendalam, serta mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih presisi untuk menilai progres implementasi pada masing-masing dimensi dan fase transformasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. (2012). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka.
- Akmal, M. I. (2024). Pemikiran Amin Abdullah seputar Integrasi Keilmuan. *Fathir: Jurnal Studi Islam*.
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*. Virginia: IIIT.
- Aminuddin, L. H. (2010). *Integrasi Ilmu dan Agama: Studi atas Paradigma Integratif Interkonektif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Kodifikasia.

-
- Anwar, S. (2021). Integrasi Keilmuan Perspektif M. Amin Abdullah dan Imam Suprayogo. *Jurnal Pedagogy*.
- Arbi, A., Herlina, H., & Syarifuddin, S. (2024). Mendamaikan Islam dan Sains: Studi Integrasi Interkoneksi Ilmu di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kabupaten Bengkalis. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*.
- Arini, B. N., Inayah, S. N., & Azizah, W. N. (2026). Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Rekonsiliasi Sains Islam: Pemikiran Amin Abdullah. *Annajah Journal*.
- Diu, A. (2018). Pemikiran M. Amin Abdullah Tentang Pendidikan Islam dalam Pendekatan Integrasi-Interkoneksi. *Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*.
- Fajri, A., & Sassi, K. (2026). Eksplorasi Paradigma Baru Pendidikan Islam Era Kontemporer Perspektif Amin Abdullah. *Jurnal Inspirasi Pembelajaran*.
- Jannah, I., Gunagraha, S., & Baidi, B. (2025). Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu Agama dan Sains dalam Pemikiran Amin Abdullah: Respons Epistemologis terhadap Isu-Isu Kontemporer. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*.
- Kartanegara, M. (2005). *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Mizan.
- Masyitoh, D. (2020). Amin Abdullah dan Paradigma Integrasi-Interkoneksi. *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*.
- Mulyo, M. T. (2025). Peluang dan Tantangan Penerapan Paradigma Integrasi Interkoneksi Amin Abdullah dalam Studi Hukum Islam. *IQTISAD Journal*.
- Sadewa, M. A. (2022). Meninjau Kurikulum Prototipe melalui Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Prof. M. Amin Abdullah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Saputra, Y. M., Wildan, A. R., & Amrillah, R. (2024). Integrasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Perspektif M. Amin Abdullah. *Annajah Journal*.
- Sari, R. M., & Amin, M. (2020). Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner: Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*.
- Siswanto, S. (2013). Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi-Interkoneksi Dalam Kajian Islam. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*.
- Sufratman, S. (2022). Integrasi Agama dan Sains Modern di Universitas Islam Negeri (Studi Analisis Pemikiran M. Amin Abdullah). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*.
- Syamsurizal, O., & Dewi, E. (2026). Integrasi Agama dan Sains dalam Perspektif M. Amin Abdullah. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Syarnubi, S. (2022). Penerapan Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Peningkatan Mutu Lulusan. *Jurnal PAI Raden Fatah*.
- Utami, N. A., Prayogi, A., & Abdillah, M. (2025). Konsep, Prinsip, dan Implementasi Integrasi-Interkoneksi dalam Rekonsiliasi Sains Islam. *Annajah Journal*.
- Waston, W. (2016). Pemikiran Epistemologi Amin Abdullah dan Relevansinya bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*.